

**PELAKSANAAN PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN DAN NON
KESEHATAN POS PELAYANAN KESEHATAN TERPADU DI MASJID
PARIPURNA KECAMATAN BINAWIDIYA BERDASARKAN
PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 89 TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Strata Satu S.1 Ilmu Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

ZEDRI ROMANDA
NIM: 11727101919

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442 H/2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN POS PELAYANAN KESEHATAN TERPADU DI MASJID PARIPUNA KECAMATAN BINAWIDIYA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 89 TAHUN 2018”** yang ditulis oleh :

Nama : **Zedri Romanda**
 NIM : 11727101919
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Syawal 1442 H
 07 Juni 2021 M

Pembimbing Skripsi

Asril, S.F.I., M.H.
 NIP. 197604202009011008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian, atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018"**

Nama : **Zedri Romanda**
NIM : 11727101919
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 01 Juli 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH.,MH

Sekretaris
Nurhidayat, SH.,MH

Penguji I
Muslim, S.Ag.,SH.,M.Hum

Penguji II
Joni Alizon, SH.,MH

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN POS PELAYANAN KESEHATAN TERPADU DI MASJID PARIPUNA KECAMATAN BINAWIDIYA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 89 TAHUN 2018”** yang ditulis oleh :

Nama : **Zedri Romanda**
 NIM : 11727101919
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Syawal 1442 H
 07 Juni 2021 M

Pembimbing Skripsi

Asril, S.F.I., M.H.
 NIP. 197604202009011008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018"**

Nama : **Zedri Romanda**
NIM : **11727101919**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Kamis, 01 Juli 2021**
Waktu : **08.00 WIB**
Tempat : **Daring/Online**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH.,MH

Sekretaris
Nurhidayat, SH.,MH

Penguji I
Muslim, S.Ag.,SH.,M.Hum

Penguji II
Joni Alizon, SH.,MH

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan iayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh ummat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Aamiin.

Atas berkat Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN POS PELAYANAN KESEHATAN TERPADU DI MASJID PARIPUNA KECAMATAN BINAWIDIYA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOOR 89 TAHUN 2018"

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Ridwan dan ibunda Zulimar yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan selalu memberikan kasih sayang sehingga sampai pada perguruan tinggi saat ini, dan yang tersayang seluruh kakak dan adik penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU. Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA, selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd, selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau. Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph. D, selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau. Dan beserta stafnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. Drs.H. Heri Sunandar. M.CL , selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. Wahidin, M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak iv Dr. H. Magfirah. MA., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak Firdaus, SH, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Muslim, S.Ag., SH., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Asril, MH, selaku pembimbing penulis yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, perhatian, serta bantuannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ilham Akbar, S.H.I., SH., MH selaku penasehat akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak dan ibu karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat memudahkan penulis hingga penyelesaian skripsi penulis ini.
9. Kepada Bapak Agus Hatorangan yang telah memberikan masukan dan motivasi selama penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada staf dan pegawai kecamatan Binawidiya yang sudah memberikan pelayanan administrasi selama penelitian penulis ini.
11. Kepada seluruh kepala pengurus Masjid Paripurna Kecamatan Binawidya yang telah sudi membantu dan bekerjasama dalam penyelesain skripsi ini.
12. Kepada Nana Mutia, S.Km selaku kepala bidang kesehatan lingkungan yang telah memberikan informasi dan masukan selama penelitian skripsi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kepada Alisa Puspita yang sudah membantu dan memberikan semangat selama penyelesaian skripsi ini.

14. Kepada Khairun Nasri, SH yang sudah membantu memberikan masukan serta bimbingan selama penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wata'ala. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekanbaru, 08 Juni 2021

Penyusun

ZEDRI ROMANDA
NIM. 11727101919

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018.**

Skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang bahwa adanya sebuah Peraturan Walikota yang belum terlaksana dengan baik, yaitu Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dalam hal ini pelaksanaan penyediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan pos pelayanan kesehatan terpadu Masjid Paripurna di Kecamatan Binawidiya. Permasalahan pada penelitian ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis dengan cara langsung survei lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan kajian pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kemudian dalam populasi dan sampel dengan metode *purposive sampling*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan penyediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan pos pelayanan kesehatan Terpadu Masjid Paripurna di Kecamatan Binawidiya berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018, maka berdasarkan wawancara dan observasi pelaksanaan peraturan ini belum berjalan dengan baik, pos belum terbentuk serta tenaga kesehatan dan non kesehatan tidak tersedia. Dan hambatan pelaksanaan peraturan ini adalah kurangnya sosialisasi, terbatasnya penyelenggaraan anggaran, tidak mampu menyediakan sarana dan prasarana, dan kurangnya sumber daya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM	15
A. Sejarah Kecamatan Tampan	15
B. Landasan Terbentuknya Kecamatan Tampan.....	19
C. Visi dan Misi Kecamatan Tampan.....	19
D. Kondisi Geografis Kecamatan Tampan	20
E. Jumlah Pegawai	24
F. Jumlah Penduduk.....	25
G. Kondisi Pendidikan.....	26
H. Kondisi Agama	28
I. Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya	28

BAB III TINJAUAN PUSTAKA31

A. Pengertian Masjid Paripurna	31
B. Maksud dan Tujuan Masjid Paripurna	32
C. Azaz dan Visi Misi Masjid Paripurna	33
D. Peran dan Fungsi Masjid Paripurna	34
E. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru	35
F. Definsi Pelaksanaan	36
G. Teori Pemerintahan Daerah	37
H. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah	39
I. Kesehatan Masyarakat	41

BAB IV PELAKSANAAN PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN POS PELAYANAN KESEHATAN TERPADU DI MASJID PARIPURNA KECAMATAN BINAWIDIYA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 89 TAHUN 2018.....44

A. Pelaksanaan penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018.....	44
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018	58
---	----

BAB V PENUTUP76

A. Kesimpulan.....76

B. Saran77

DAFTAR PUSTAKA78

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Tampan Dirinci Menurut Kelompok Jenis Kelamin Tahun 2020.....	25
Tabel I.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan Dirinci Menurut Kelompok Jenis Kelamin 2018	26
Tabel I.3	Jumlah Murid Sekolah Umum Menurut Kelurahan dan Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Tampan, 2017.....	27
Tabel I.4	Jumlah Murid Sekolah Umum Menurut Kelurahan dan Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Tampan, 2017.....	28
Tabel II.1	Jumlah Daftar Masjid Paripurna Kecamatan Tampan sebelum pemekaran, 2020	48
Tabel II.2	Jumlah Daftar Masjid Paripurna Kecamatan Binawdidya setelah pemekaran, 2021	49

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum. Segala sesuatu diatur dengan hukum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut hukum di Negara Indonesia mempunyai arti bahwa hukum di atas segala-galanya, hukum sebagai panglima.¹

Selain itu Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan pula bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.²

Otonomi Daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.³

Kemudian di dalam pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan pemerintah daerah berhak

¹ Mudakir Iskandar Syah, *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, (Ciputat: Tatanusa, 2017), h. 99.

² Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). h, 17.

³ Syamsudin Haris, *Desentralisasi & otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2007). h, 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan diembannya tugas Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut maka pembentukan berbagai peraturan di Negara Republik Indonesia menjadi sangat penting, oleh karena campur tangan Negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan-peraturan Negara.⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonomi sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah mengartikan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia⁶

Penguatan fungsi dan penyelenggaraan pemerintah daerah menurut otonomi dan tugas pembantuan diarahkan dan dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Per-Undang-Undangan*, (DIY: Kanisius, 2017), Cet. Ke-18, h. 1.

⁵ Widaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 76.

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-9, h. 329-330.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia⁷

Sehubungan dengan itu pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk membentuk suatu aturan hukum yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Karena kesehatan masyarakat merupakan pilar pembangunan suatu bangsa. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan adalah segala-galanya, tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna.⁸

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang menyeluruh, terarah, terpadu, termasuk pembangunan bidang kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup bagi setiap orang

⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 96-97.

⁸ Indra Perwira, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, dalam Bagir Manan, et.al., *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bandung: PSKN FH UNPAD, 2009), h. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H menyebutkan Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tujuan kesehatan masyarakat adalah agar setiap individu dalam masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal (jasmani, rohani dan sosial) dan diharapkan berumur panjang dan lebih produktif.⁹

Kesehatan masyarakat juga harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Faktor yang mempengaruhi masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan tergantung pada pengetahuan apa yang ditawarkan dalam pelayanan, bagaimana, kapan, oleh siapa dan dengan biaya berapa pelayanan kesehatan dapat diperoleh.¹⁰ Dalam mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat pemerintah kota Pekanbaru membentuk Peraturan Walikota

⁹ Sri Herlina dan Mustafa Lutfi, *Kesehatan Masyarakat (Implementasi, konsep, scenario kasus, dan Dasar Hukum)*, (Malang: Intimedia, 2019), h. 31.

¹⁰ Trimurthy, *Pelayanan Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

Program pos kesehatan terpadu di Masjid Paripurna ini merupakan terobosan dan inovasi yang dilakukan Pemko Pekanbaru dalam bidang percepatan pelayanan kesehatan. Sehingga masjid tidak hanya sekedar menjadi tempat ritual ibadah saja. Tapi juga bisa menjadi tempat pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan perekonomian.

Kendati demikian, meskipun peraturan Pemerintah Walikota Pekanbaru telah ditetapkan, namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Hal ini sebagaimana belum terlaksananya Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Masjid Paripurna harus memiliki sumber daya manusia di Pos Pelayanan Kesehatan yang terdiri atas Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Non Kesehatan.

Dari hasil pengamatan penulis, Masjid Paripurna yang terdapat di kecamatan binawidiya belum terdapat tenaga kesehatan dan non kesehatan pada pos pelayanan kesehatan seperti yang tertuang dalam perwako tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN POS PELAYANAN KESEHATAN TERPADU DI MASJID PARIPURNA KECAMATAN BINAWIDIYA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 89 TAHUN 2018”**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan mengambil batasan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini di fokuskan pada bagaimana Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya dan faktor apa saja yang menjadi Penghambat Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018?
2. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dikemukakan tujuan penelitian:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan pos pelayanan terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat terhadap pelaksanaan penyediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan pos pelayanan terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018

b. Secara Akademis

- 1) Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan
- 2) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya penelitian baru yang dapat mendukung dalam pengembangan pos pelayanan kesehatan terpadu di Masjid Paripurna.
- 3) Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survei langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapatkan langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.¹¹ Pendekatan Hukum sosiologis ini mengamati dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci.¹²

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini terletak di Kecamatan Binawidiya Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi ini karena adanya masalah pelaksanaan penyediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan di pos pelayanan terpadu Masjid Paripurna. Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis

¹¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2003), Cet. ke-1, h.133.

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan observasi, wawancara, mengenai permasalahan pelaksanaan penyediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan di Masjid Paripurna.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.¹³

Populasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.¹⁴

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dan menemukan penelitian.¹⁵

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang dianggap relevan dengan penelitian, *purposive sampling* yaitu penulis menentukan sendiri sampel yang penulis pandang cakap dan layak untuk memberikan data mengenai penelitian ini dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal dalam penelitian ini.¹⁶

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.42.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h.122.

¹⁵ *Op.cit.*, h,43.

¹⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.¹⁷

Adapaun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian adalah sebagai berikut:

NO	Nama Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase
1	Kepala Masjid Paripurna di Kecamatan Binawidiya	4 Masjid	4 Masjid	100%
2	Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100%
3	Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Binawidiya	1 Orang	1 Orang	100%
4	Pegawai Puskesmas Simpang Baru	1 Orang	1 Orang	100%

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h.116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan data kepada pengumpul data.¹⁸ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dari responden, wawancara dan kajian pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

- b. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan penulis guna mendukung data primer, ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku literatur, surat kabar, majalah, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.¹⁹

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

- a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁰ Jadi observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai masalah yang diteliti.

- b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.225.

¹⁹ Amiruddin, *op. cit*, h.30.

²⁰ Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Mataram: Yayasan Cerdas Pers, 2006), h.88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²¹ Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

c. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang dapat mendukung dan menguatkan penelitian yang penulis lakukan. Metode penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yakni data yang penulis peroleh, lalu penulis olah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, Undang-Undang, dokumen dan data lainnya serta dengan membandingkan dengan pendapat para ahli. Setelah data berhasil dikumpulkan, diteliti mengenai kejelasannya, lalu data tersebut dianalisa dengan cara membandingkan data primer dengan data sekunder sehingga diperoleh hasil perbandingan antara teori dan praktik. Penarikan kesimpulan yang digunakan ialah penarikan kesimpulan induktif, yang sebagaimana penarikan kesimpulan induktif adalah penarikan kesimpulan yang bersifat khusus ke umum

²¹ *Ibid.*, h.99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan data yang diamati dengan cara menyimpulkan kasus-kasus yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam pembahasan ini dipaparkan tentang: Sejarah, landasan terbentuknya, visi Misi, kondisi geografis, jumlah pegawai, jumlah penduduk, kondisi pendidikan, kondisi agama Kecamatan Tampan dan nama-nama Masjid Paripurna. Beserta juga dengan struktur dan pegawai lembaga-lembaga terkait.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang: Pengertian, maksud dan tujuan, azas, visi misi, peran dan fungsi Masjid Paripurna, peraturan walikota Nomor 89 Tahun 2018, definisi pelaksanaan, teori pemerintah daerah, teori peraturan perundang-undangan tingkat daerah dan kesehatan masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di bahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018, serta faktor apa yang menghambat Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ± 199.792 KM². Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa desa dan kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu, Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu dan Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu.²²

Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 03 Tahun 2003. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2005 pemerintah kota pekanbaru No. 03 Tahun 2003, yang sebagaimana wilayah Kecamatan Tampan di mekarkan menjadi 2 kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut :²³

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru).
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar).

²² Ekspos Kecamatan Tampan Tahun 2020, Oleh. Liswarti.

²³ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tanayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru).
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tapung (Kabupaten Kampar).

Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini seluas 59,81 Km² yang terdiri dari 4 Kelurahan Yaitu :

- a. Kelurahan Simpang Baru.
- b. Kelurahan Tuah Karya.
- c. Kelurahan Sidomulyo Barat.
- d. Kelurahan Delima.

Pada tahun 2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan, telah dilakukan pemekaran pada Kecamatan Tampan yakni terbagi menjadi 2 yakni, Kecamatan Tuah Madani dan Kecamatan Binawidiya. Kecamatan Binawidiya memiliki iklim yang tidak jauh berbeda pada umumnya yakni beriklim tropis. Akses menuju kantor kecamatan lebih kurang 1 km, dan akses menuju ke kota sangat dekat, karena Kecamatan Binawidiya berada tepat di pinggir pusat kota.

Sejak terbentuknya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru hingga dilakukan pemekaran menjadi Kecamatan Binawidiya, sudah beberapa camat yang menjabat. Adapun nama camat-camat yang memimpin dari awal terbentuk hingga sekarang sebagai berikut :

1. Drs. R. MARJOHAN

Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru periode : -

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Drs. SUDARYANTO

Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru periode : -

3. Drs. ASMADI USMAN

Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru periode : -

4. Drs. H. EDI SATRIA

Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru periode : Juni 2001 S/D
Maret 2005

5. H. ADI SUASKA, S.Sos

Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Periode : Maret 2005 s/d
Oktober 2008.

6. HUZAIMI IBRAHIM, S.Sos

Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Periode : Oktober 2008 s/d
Desember 2009.

7. WIRAHARYOKO, AP, M.Si

Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Periode : Desember 2009 s/d
Januari 2011.

8. BAHARUDDIN, S.Sos, M.Si

Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Periode : Januari 2011 s/d
September 2011.

9. RAMLI, S.Sos

Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Periode : September 2011
s/d Maret 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. BAHARUDDIN, S.Sos, M.Si
Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Periode : Maret 2012 s/d Januari 2013.
11. Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si
Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Periode : Januari 2013 s/d Maret 2014.
12. CHAIRANI, SSTP, M.Si
Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Periode : Maret 2014 s/d April 2015.
13. SYAMSUIR, S.Sos
Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Periode : April 2015 s/d Februari 2016.
14. NURHASMINSYAH, SSTP, M.Si
Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Periode : Februari 2016 s/d Januari 2019.
15. Dra. Hj. LISWARTI
Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Periode : Januari 2019 s/d April 2020.
16. Abdul Barri, S.Ip
Camat Kecamatan Tampan/Binawidiya Kota Pekanbaru Periode : April 2020 s/d Sekarang.²⁴

²⁴ Ekspos Kecamatan Tampan Tahun 2020, Oleh. Liswarti, *op. cit.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Landasan Terbentuknya Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ± 199.792 KM².²⁵ Pada Tahun 2021 Telah dilaksanakan Pemekaran pada Kecamatan Tampan menjadi 2 kecamatan baru yakni Kecamatan Tuah Madani dan Kecamatan Binawidiya. Landasannya tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kecamatan.²⁶

C. Visi dan Misi Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan kota Pekanbaru memiliki Visi dan Misinya tersendiri yang sebagai pedoman dalam menjalankan programnya.

Adapun visi dan misi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Visi
Terwujudnya pekanbaru sebagai *smart city* yang madani.
- b. Misi
 1. Menjadikan kinerja pemerintah kecamatan yang baik dan bertanggung jawab serta profesional.
 2. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang efektif, cepat, tepat dan mudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

²⁵ <http://repository.uin-suska.ac.id/7211/3/BAB%20II.pdf>. Di akses pada tanggal 3 Juni 2019.

²⁶ <https://www.riauin.com/read-20293-2020-12-30-resmi-pekanbaru-miliki-3-kecamatan-baru-berikut-daftarnya.html>. Di akses pada tanggal 30 Desember 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mewujudkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kecamatan.
4. Mewujudkan masyarakat Tampan yang sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.
5. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha kecil dan menengah.²⁷

D. Kondisi Geografis Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 131 RW dan 574 RT. Luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 59,81 km² dengan Jumlah Kelurahan kelurahan sebanyak 9 Kelurahan sebelum adanya pemekaran menjadi kecamatan Binawidiya yaitu:

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Sidomulyo Barat
3. Kelurahan Tuah Karya
4. Kelurahan Delima
5. Kelurahan Tuah Madani
6. Kelurahan Sialang Munggu
7. Kelurahan Tobek Godang
8. Kelurahan Bina Widya
9. Kelurahan Air Putih

Batas-batas wilayah Kecamatan Tampan sebelum perubahan kecamatan Binawidiya adalah:

²⁷ Ekspos Kecamatan Tampan Tahun 2020, Oleh. Liswarti.op. cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai / Siak Hulu.

Sebelah barat :berbatasan dengan Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki.

Sebelah selatan :berbatasan dengan Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

Setelah dilaksanakannya pemekaran Kecamatan Tampan, maka Kecamatan Binawidiya terdiri dari 5 Kelurahan, Yaitu:

1. Simpang Baru
2. Delima
3. Tobek Godang
4. Binawdiya
5. Sungai Sibam

PENJELASAN TEKNIS :

1. Letak dan Luas : Kecamatan Tampan merupakan daerah bertopografi datar dengan letak geografis antara 0042" - 0050" Lintang Utara dan Antara 101035"- 101043" Bujur Timur.
2. Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.NO.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ± 199.792 km².
3. Kecamatan Tampan terbentuk dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten kampar yaitu, Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Sidomulyo Barat , Desa Labuh Baru dan Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu.

4. Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda NO. 03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan di mekarkan menjadi 2. Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan marpoyan damai, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah utara bebatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki dan sebelah selatan bebatasan dengan Kabupaten Kampar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka di bentuklah kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2016 menjadi 9 kelurahan.

5. Pada Tahun 2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kecamatan, Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 kecamatan baru yakni Kecamatan Tuah Madani dan Kecamatan Bindawidiya.

6. Geologi

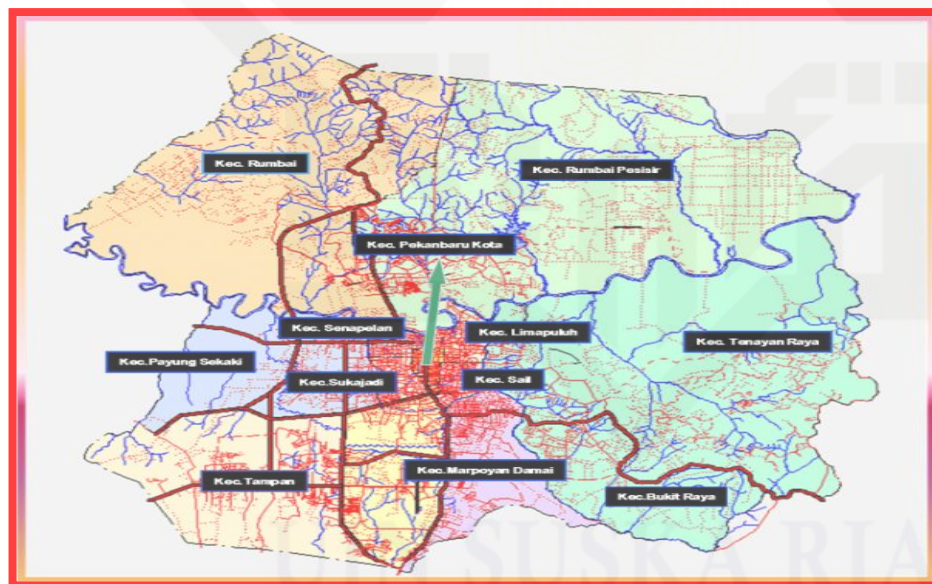
Kecamatan Tampan keadaannya relatif daerah datar dengan: Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis Aluvial dengan pasir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

gambar



Sumber : Kecamatan Tampan Dalam Angka 2018



Sumber : Ekspos Kecamatan Tampan Tahun 2020, Oleh. Liswarti

²⁸ *Kecamatan Tampan Dalam Angka 2018.*

E. Jumlah Pegawai

Sebelum terjadinya pemekaran pada Kecamatan Tampan, adapun jumlah keseluruhan pegawai dari kecamatan Tampan berjumlah 97 orang, yang terdiri dari laki-laki : 44 Orang, perempuan : 53 Orang. Jumlah ini berdasarkan dari keseluruhan pegawai yang terdapat di kecamatan dan seluruh kelurahan di Kecamatan Tampan kota pekanbaru sebelum terjadinya pemekaran menjadi Kecamatan Binawidiya.

Table I. 1
Jumlah Pegawai Kecamatan Tampan Dirinci Menurut Kelompok Jenis Kelamin Tahun 2020

Instansi	Laki-Laki	Perempuan	Total
Kantor Camat Tampan	13	14	27
Kantor Lurah Delima	2	5	7
Kantor Lurah Simpang Baru	2	6	8
Kantor Lurah Sidomulyo Barat	4	5	9
Kantor Lurah Tuah Karya	4	4	8
Kantor Lurah Tuah Madani	4	4	8
Kantor Lurah Sialangmunggu	3	4	7
Kantor Lurah Airputih	6	1	7
Kantor Lurah Binawidiya	4	4	8
Kantor Lurah Tobekgodang	2	6	8
TOTAL	44	53	97

Sumber : Ekspos Kecamatan Tampan Tahun 2020, Oleh. Liswarti

F. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Tampan mencapai 307.947 jiwa pada tahun 2018. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,96 persen dari tahun 2017. Kepadatan penduduknya mencapai 4.811 jiwa/km². Pada data terakhir, jumlah penduduk Kecamatan Tampan berjumlah 212. 813 jiwa.

Table I. 2
Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan Dirinci Menurut Kelompok Jenis Kelamin Tahun 2018

NO	KELURAHAN	JUMLAH KK	PENDUDUK			JUMLAH RW	JUMLAH RT
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	DELIMA	2877	6030	6642	12672	9	48
2	TOBEK GODANG	5670	13646	12531	26177	15	72
3	SIMPANG BARU	3011	9371	9233	18604	11	35
4	BINAWIDYA	5006	8960	9073	18033	9	29
5	AIRPUTIH	4171	8488	7893	16381	10	60
6	TUAHMA DANI	5930	12081	11820	23901	8	31
7	TUAH KARYA	7238	15122	14997	30119	19	85
8	SIALANG MUNGGU	9944	18722	18756	37478	31	125
9	SIDOMULYO BARAT	8950	14962	14486	29448	25	106
TOTAL		52.797	107.382	105.431	212.813	137	591

Sumber : BPS-Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha dasar manusia untuk mempersiapkan manusia mempunyai kemampuan untuk berperan aktif dalam membentuk masa depannya.²⁹ Maka pendidikan adalah hal yang paling penting bagi seluruh kalangan demi kesejahteraan dalam kehidupan. Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kecamatan Tampan dalam publikasi ini disajikan mengenai data pendidikan meliputi data TK, SD, SLTP dan SLTA baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta.³⁰

Table I. 3
Jumlah Murid Sekolah Umum Menurut Kelurahan dan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tampan, 2017.

No	Kelurahan	TK	SD		SMP	
			Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Simpang Baru	62	172	568	-	322
2	Sidomulyo Barat	224	2622	2345	-	550
3	Tuah Karya	216	1730	1393	-	305
4	Delima	218	739	1362	-	199
5	Tuah Madani	54	2856	363	-	141
6	Sialang Munggu	198	3342	840	151	213
7	Tobek Godang	167	1361	694	1103	521
8	Bina Widiya	123	668	1094	1602	504

²⁹ Agus Irianto, *Pendidikan Sebagai Investasi Dalam Pembangunan Suatu Bangsa*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.3.

³⁰ *Kecamatan Tampan Dalam Angka 2018. op. cit.*

9	Air Putih	136	1523	26	-	-
Jumlah		1398	15013	8685	2856	2755

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Table I. 4
Jumlah Murid Sekolah Umum Menurut Kelurahan dan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tampan, 2017

No	Kelurahan	SMA		SMK		Jumlah
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
1	Simpang Baru	-	21	-	72	192
2	Sidomulyo Barat	-	25	89	-	506
3	Tuah Karya	-	35	-	23	312
4	Delima	-	-	-	10	238
5	Tuah Madani	-	-	-	9	165
6	Sialang Munggu	37	-	30	46	398
7	Tobek Godang	-	23	-	110	382
8	Bina Widiya	76	10	-	37	391
9	Air Putih	-	-	-	-	-
Jumlah		113	114	119	307	2587

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Kondisi Agama

Kewajiban bagi setiap manusia baik itu beragama muslim atau non-muslim hendaklah beribadah sesuai kepercayaannya. Jalan untuk mengetahui hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang diharamkan dalam agama adalah belajar ilmu agama secara *talaqqi* kepada ahlinya (ulama yang terpercaya dan memiliki sanad keilmuan yang bersambung hingga kepada Rasulillah).

Bagi agama islam, islam dan iman ialah mengikrarkan (menyatakan) dengan lidah dan membenarkan dalam hati bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka tidak sempurnalah imannya seorang muslim kecuali dengan melaksanakan seluruh kewajiban dan menjauhi segala yang diharamkan.³¹ Atas dasar inilah, agama menjadi hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Data yang dikumpulkan dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada Tahun 2018 di Kecamatan Tampan terdapat 326 tempat Ibadah, baik itu masjid, surau/Mushalla, gereja dan Vihara/Klenteng.

I. Masjid Paripurna Kecamatan Tampan

Masjid Paripurna adalah masjid yang dijadikan tempat ibadah, selain sebagai tempat ibadah Masjid Paripurna juga dikelola oleh pemerintah kota pekanbaru, baik program-programnya yakni Ri'yah, Imarah dan Idarah dan juga program sosial lainnya. Sebelum adanya pemekaran Kecamatan Tampan Jumlah Masjid Paripurna Kecamatan Tampan Terdiri dari :

1. Masjid Nurul Hidayah, Kelurahan Binawidya,

³¹ Jam'iyyah Al Masyari' Al Khairiyyah Al Islamiyyah, *Tsaqafah Islamiyah*, (Libanon : Kemenag, 2015), h.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alamat :Jl. Kayu Ulin.

2. Masjid Darul Ikhsan, Kelurahan Delima,

Alamat : Jl. Flamboyan Iv

3. Masjid Al Huda, Kelurahan Tobek Godang,

Alamat : Jl. Hr. Soebrantas.

4. Masjid Al-Firdaus, Kelurahan Sialang Munggu,

Alamat : Jl. Cipta Karya.

5. Masjid Nurul Ikhsan, Kelurahan Tuah Madani,

Alamat : Jl. Hr. Soebrantas.

6. Masjid Al-Mukminin, Kelurahan Simpang Baru,

Alamat : Jl. Kutilang Sakti.

7. Masjid Al-Ukhuwah, Kelurahan Air Putih,

Alamat : Jl. Garuda Sakti.

8. Masjid Al-Muhajirin, Kelurahan Sidomulyo Barat,

Alamat : Jl. Muhajirin Perum Purna Griya.

9. Masjid Al-Ma'ruf , Kelurahan Tuah Karya,

Alamat : Jalan Suka Karya.

Setelah Kecamatan Tampan terjadi pemekaran maka Masjid Paripurna dibagi setiap per-kecamatanannya. Pada Kecamatan Binawidiya jumlah Masjid Paripurna untuk saat ini hanya terdata 4 Masjid Paripurna, yaitu :

1. Masjid Al-Mukminin, Kelurahan Simpang Baru

Alamat : Jl. Kutilang Sakti

2. Masjid Al Huda, Kelurahan Tobek Godang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alamat : Jl. Hr. Soebrantas.

3. Masjid Darul Ikhsan, Kelurahan Delima,

Alamat : Jl. Flamboyan Iv

4. Masjid- Az-Zikra, Kelurahan Sungai Sibam

Alamat : Jl. Beringin.³²



³² Yese poita indri putri, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Binawidiya, wawancara, Pekanbaru, 2 Maret 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Masjid Paripurna

Umat Islam atau masyarakat Islam adalah sekumpulan orang-orang Islam yang hidup dalam suatu jamaah pada suatu daerah tertentu, mereka beribadah mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari seoptimal mungkin. Semua kegiatan umat terpusat di masjid dengan imam sebagai manajer yang efektif dari setiap masjid. Masjid mempunyai daerah pembinaan yang tertentu dan pembinaan diberikan dengan maksimal kepada masyarakat sekelilingnya yang menjadi jamaah tetap pada masjid tersebut.³³

Pelayanan bagi jamaah tidak tetap dapat diberikan dalam bentuk pemberian informasi atau bantuan yang sifatnya bantuan darurat (*emergency*) atau bantuan lain yang sesuai dengan fungsi masjid sebagai tempat beribadah dalam arti luas.³⁴ Masjid sebagai tempat melaksanakan ibadah secara berjamaah memiliki nilai tersendiri. Shalat berjamaah termasuk salah satu keistimewaan yang diberikan dan disyariatkan secara khusus bagi umat Islam. Shalat berjamaah mengandung nilai-nilai pembiasaan diri untuk patuh, bersabar, berani, dan tertib aturan, di samping nilai sosial untuk menyatukan hati dan menguatkan ikatan.³⁵

³³ Supardi dan Teuku Amiruddin, *Manajemen Masjid Dalam Pembanguann Masyarakat*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h.10.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. Ke-4, h.238.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Masjid Paripurna adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk ibadah mahdhah (khusus) maupun ibadah ghairu mahdhah (ibadah secara umum) yang mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah serta dikelola dengan manajemen yang baik dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid.³⁶

Masjid Paripurna ditetapkan oleh keputusan Walikota dengan menimbang dan memperhatikan rekomendasi tim seleksi penetapan Masjid Paripurna. Status Masjid Paripurna tersebut ditentukan oleh ada atau tidaknya aktivitas Imarah, idarah dan Ri'ayah yang meliputi berbagai hal seperti adanya pengurus dan jama'ah yang aktif, kemudian menjalankan program Masjid Paripurna salah satunya ialah pos pelayanan kesehatan terpadu yang harus terdapat tenaga kesehatan dan non kesehatan. Masih banyak terdapat Masjid Paripurna yang belum menjalankan programnya sebagaimana terdapat dalam aturan Walikota.

B. Maksud dan Tujuan Masjid Paripurna

Adapun maksud dan tujuan Masjid Paripurna adalah :

1. Maksud pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna adalah dalam rangka optimalisasi fungsi masjid di bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah melalui pengelolaan manajemen secara professional.
2. Adapun Tujuan Masjid Paripurna :

³⁶ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mewujudkan masyarakat madani sebagai amanat yang tertuang dalam Visi Kota Pekanbaru 2021 dan Visi Antara Walikota terpilih 2012-2017 yang tertuang di dalam RPJD dan RPJMD Kota Pekanbaru.
- b. Menjadikan Masjid Paripurna sebagai program strategis pemerintah dan implementasi tugas pemerintah dalam melayani, membina dan memberdayakan masyarakat.
- c. Menjadikan Masjid Paripurna sebagai pusat pembinaan dan peningkatan iman dan taqwa serta pengembangan ilmu dan pengamalan Akhlak Al Karimah dalam mewujudkan Pekanbaru sebagai kota Metropolitan yang Madani.³⁷

C. Azas dan Visi Misi Masjid Paripurna

1. Azas Masjid Paripurna

Masjid Paripurna Kota Pekanbaru berasaskan islam yang berpedoman kepada Al-qur"an dan As-Sunnah .

2. Visi Masjid Paripurna

Terwujudnya Masjid Paripurna sebagai pusat pembinaan masyarakat menuju negeri yang baldatun thayyubatun wa rabbun Ghafur tahun 2021.

3. Misi Masjid Paripurna

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap pengolahan manajemen Masjid Paripurna secara profesional.
- b. Memakmurkan Masjid Paripurna melalui peningkatan kegiatan bidang idarah, imarah dan ri'ayah

³⁷ Pasal 4 Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan kegiatan ibadah (mahdhah dan ghairu mahdhah) Dakwah, zikir, dan ta'lim rutin terjadwal.
- d. Melaksanakan program pembinaan ilmu, akhlak dan etika.
- e. Melaksanakan pembinaan terhadap generasi muda melalui kegiatan agama dan keterampilan.
- f. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial melalui pendekatan ekonomi sosial dan budaya.

D. Peran dan Fungsi Masjid Paripurna

Secara umum masjid memiliki peran sebagai pusat pembinaan umat, didalam masjid orang mengajarkan kepada umat Islam tentang segala kewajibannya yang harus ditunaikan di dunia dengan menyampaikan berita gembira (*Basyiran*) dan menyampaikan berita duka (*Naziran*).³⁸ Contohnya ialah seperti organisasi dan juga pelatihan-pelatihan training mubhaligh, qirat dan lain-lain.

Setiap Masjid Paripurna memiliki peran dan fungsi sebagai tempat ibadah dan juga kegiatan lainnya. Masjid Paripurna melaksanakan program imarah yang bertujuan untuk meramaikan dan memakmurkan Masjid Paripurna. Program imarah ini sendiri terdiri dari Ibadah, Pendidikan, Da'wah, Remaja Masjid, Pembinaan dan pelatihan, Kegiatan sosial dan kegiatan yang dapat menunjang kemakmuran jama'ah dan masjid.

Masjid Paripurna juga memiliki peran untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi jama'ah dan juga masyarakat sekelilingnya melalui dari

³⁸ Supardi dan Teuku Amiruddin, *op. cit.*, h.126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

program Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Masjid Paripurna. Pos pelayanan kesehatan terpadu ini nantinya akan dijalankan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagai upaya dalam menjaga kesehatan para jama'ah dan masyarakat sekelilingnya.

E. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru merupakan bentuk usaha pemerintah kota Pekanbaru dalam memberikan fasilitas kesehatan yang dilaksanakan di Masjid Paripurna selain tempat ibadah. Sebagaimana visi dan misi Walikota Pekanbaru yakni ingin menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota *Smart City* Madani.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru ini hadir sebagai bentuk program dari adanya Masjid Paripurna Di Kota Pekanbaru. Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu yang selanjutnya disebut fasilitas pelayanan kesehatan, menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) untuk mewujudkan masyarakat masjid yang memiliki perilaku sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat dan memiliki derajat kesehatan yang optimal sekaligus jamaah yang berkunjung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna, yang sekaligus merupakan program dari adanya Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru. Peraturan Walikota ini telah ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru pada tanggal 28 Juni 2018 dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 28 Juni 2018. Dalam Peraturan Walikota ini terdiri dari VIII (delapan) Bab dan 24 pasal.

Pembahasan yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 ini adalah Ketentuan umum pos pelayanan kesehatan terpadu, prinsip penyelenggaraan, tugas, fungsi dan wewenang, persyaratan, penyelenggaraan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan.

F. Definisi Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.³⁹ Wiestra, dkk mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.⁴⁰

Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi. Bintoro Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.627.

⁴⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program proyek.⁴¹ Pelaksanaan dapat diartikan juga sebagai implementasi dan juga penerapan.

Menurut Agustino, “Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.⁴² Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.⁴³

G. Teori Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Pendelegasian sebagian wewenang dari

⁴¹ Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2011), h.24.

⁴² Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010, h.139.

⁴³ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI Bandung, 2006), h.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seseorang atau instansi suatu organisasi merupakan salah satu asas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuannya agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, meringankan beban kerja pimpinan, memencarkan peranan pimpinan sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiatan organisasi.⁴⁴

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah dengan didasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu. Asas desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintahan Negara kepada pemerintah local untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.⁴⁵ Menurut Amrah Muslimin, Asas Dekonsentrasi ialah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah.⁴⁶ Asas tugas pembantu ialah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah local yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya.⁴⁷

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diartikan sebagai penyelenggaran urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

⁴⁴ Mustamin DG. Matutu dkk, Mandat, Delegasi, Attribusi dan Implementasinya di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 1999, h. 24-26.

⁴⁵ Ni'matul Huda, *Hukum...*, *op. cit.*, h.328-329.

⁴⁶ Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung: Alumni, 1986), h.4.

⁴⁷ Ni'matul Huda, *Hukum...*, *op.cit.*, h.334.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁸

H. Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah

Produk hukum tingkat daerah ialah peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat daerah. Pada tingkat daerah produk hukum terbagi menjadi beberapa yakni :

1. Peraturan Daerah Provinsi
2. Peraturan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Bupati atau Walikota/ Kepala Daerah Kabupaten/Kota

Dari keempat produk hukum tingkat daerah ini memiliki kebijakan dan fungsi masing-masing sesuai tingkatannya. Adapun rincian produk hukum tingkat daerah ini adalah:

1. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan daerah provinsi adalah peraturan yang dibentuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Provinsi bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Peraturan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi

⁴⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan di Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi.

3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati atau Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Bupati atau Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

4. Peraturan Bupati atau Walikota/ Kepala Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Bupati atau Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴⁹

Sebagaimana dalam Pasal 2 huruf a dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Adapun beberapa jenis Peraturan yaitu:

1. Perda (Peraturan Daerah)
2. Perkada (Peraturan Kepala Daerah)
3. Peraturan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

⁴⁹ Maria Farida Indrati, *op. cit.*, h.202-203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ketiga produk hukum daerah inilah daerah mempunyai kekuatan hukum dalam tugas dan wewenangnya sebagai pemerintah daerah.

I. Kesehatan Masyarakat

1. Definisi kesehatan masyarakat

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, definisi kesehatan ini tertuang dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Ilmu kesehatan masyarakat adalah masyarakat ilmu atau seni yang bertujuan untuk mencegah penyakit, memperpanjang umur, dan meningkatkan efesiensi hidup masyarakat (fisik dan mental) secara berhasil guna melalui upaya pengorganisasian kelompok-kelompok masyarakat yang terkoordinasi dan memanfaatkan potensi di masyarakat untuk perbaikan kesehatan lingkungan, mencegah dan memberantas penyakit menular, infeksi dan melakukan pendidikan kesehatan (penyuluhan) tentang prinsip-prinsip kesehatan perorangan, pengorganisasian pengobatan, perawatan, diagnosa dini penyakit dan pencegahan, serta pengembangan gerakan sosial yang mendorong setiap individu di masyarakat memelihara kesehatan dalam setiap perilaku kehidupan sehari-hari.⁵⁰

⁵⁰ Sri Herlina dan Mustafa Lutfi, *op. cit.*, h.26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prinsip Dasar Kesehatan Masyarakat

Untuk melaksanakan suatu usaha kesehatan masyarakat perlu memperhatikan beberapa prinsip pokok sebagai berikut:

- a) Usaha kesehatan masyarakat lebih mengutamakan tindakan promotif dan preventif (pencegahan) dari pada kuratif (pengobatan).
- b) Dalam melaksanakan tindakan pencegahan (promotif dan preventif) selalu menggunakan cara-cara dengan biaya ringan dan rendah dengan mengharapkan hasil yang baik.
- c) Usaha kesehatan masyarakat berlandaskan dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat atau menitik-beratkan pada masyarakat, baik sebagai pelaku (subyek) dan sasaran (obyek).
- d) Usaha kesehatan masyarakat selalu melibatkan masyarakat sebagai pelaku kegiatan masyarakat.
- e) Usaha-usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan harus diangkat dari masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat dan harus ditanggulangi.
- f) Sasaran yang diutamakan adalah masyarakat yang terorganisir.
- g) Mengutamakan masalah-masalah kesehatan kemasyarakatan dari pada kesehatan perorangan.⁵¹

3. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat

⁵¹ Ibid., h.32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan serta kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas sangat dipengaruhi oleh lokasi, apakah terjangkau oleh masyarakat atau tidak, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan, serta program pelayanan kesehatan itu sendiri apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan atau tidak

Pelayanan kesehatan disini adalah pelayanan kesehatan yang paripurna dan integrative antara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative. Semakin mudah diakses individu/masyarakat terhadap pelayanan kesehatan maka derajat kesehatan masyarakat akan semakin baik. Ada tidaknya fasilitas pelayanan kesehatan, keterjangkauan, pembiayaan, dan program pelayanan penting dalam status kesehatan masyarakat.⁵²

⁵² *Ibid.*, h.35.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 belum terlaksana dengan baik. Kurangnya partisipasi aktif oleh Masjid Paripurna yang berada di Kecamatan Binawidiya membuat program ini tidak terlaksana. Pengurus Masjid Paripurna sangat banyak yang tidak mengetahui peraturan walikota tersebut dikarenakan pemerintah belum memberikan sosialisasi terkait peraturan walikota. Dengan tidak adanya informasi tersebut pelaksanaan penyediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan pos pelayanan kesehatan terpadu Masjid Paripurna tidak terlaksana dengan baik.
2. Hambatan atau kendala Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 adalah kurangnya sosialisasi mengenai program pos pelayanan kesehatan terpadu Masjid Paripurna, pemerintah tidak menyiapkan sumber dana atau anggaran untuk setiap Masjid Paripurna untuk melaksanakan program ini sehingga setiap Masjid Paripurna tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu melaksanakannya dan tidak tersedianya sarana dan prasarana di Masjid Paripurna baik fasilitas tempat, peralatan dan kebutuhan lainnya.

B. Saran

Untuk bisa diterapkan Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 setelah penulis melakukan penelitian maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan perubahan atas Peraturan Walikota karena tidak menjelaskan secara rinci terkait anggaran dalam pelaksanaannya dan lebih responsif dan memberikan sosialisasi, sumber dana dan masukan kepada Masjid Paripurna, hal ini bisa dilihat dari koordinasi pemerintah dan pengurus Masjid Paripurna kurang adanya terjalin komunikasi yang baik, sehingga pelaksanaan peraturan walikota tersebut tidak terlaksana dengan baik.
2. Bagi pengurus Masjid Paripurna hendaknya dapat mengerti dan memahami untuk melaksanakan penyediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan pos pelayanan kesehatan terpadu Masjid Paripurna untuk kepentingan masyarakat dan jamaah serta untuk mewujudkan kota pekanbaru sebagai *smart city* madani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2015.

Agus Irianto. *Pendidikan Sebagai Investasi Dalam Pembangunan Suatu Bangsa*, Jakarta: Kencana, 2011.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Persada, 2003.

Amrah Muslimin. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni, 1986.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Indra Perwira. *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, dalam Bagir Manan, et.al., *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, Bandung: PSKN FH UNPAD, 2009.

Jam'iyah Al Masyari' Al Khairiyah Al Islamiyyah. *Tsaqafah Islamiyah*, Libanon : Kemenag, 2015.

Maria Farida Indrati. *Ilmu Per-Undang-Undangan*, DIY: Kanisius, 2007.

Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Mudakir Iskandar Syah. *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, Ciputat: Tatanusa, 2017.

Muhammad Tahir Azhary. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Mustamin DG. Matutu dkk. *Mandat, Delegasi, Attribusi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Rahardjo Adisasmita. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Graham Ilmu, 2011.

Ridwan HR. *Hukum administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Supardi. *Metodologi Penelitian*, Mataram: Yayasan Cerdas Pers, 2006.

Supardi dan Teuku Amiruddin. *Manajemen Masjid Dalam Pembanguann Masyarakat*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Syamsudin Haris. *Desentralisasi & otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press, 2007.

Sri Herlina dan Mustafa Lutfi. *Kesehatan Masyarakat (Implementasi, konsep, scenario kasus,dan Dasar Hukum)*, Malang: Intimedia, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI Bandung, 2006.

Trimurthy. *Pelayanan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Gunung Mulia, 2008.

Widaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Undang-Undang / Peraturan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tanayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah



Website / Situs

Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010.

<http://repository.uin-suska.ac.id/7211/3/BAB%20II.pdf>. Di akses pada tanggal 3 Juni 2019.

<https://www.riauin.com/read-20293-2020-12-30-resmi-pekanbaru-miliki-3-kecamatan-baru-berikut-daftarnya.html>. Di akses pada tanggal 30 Desember 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

Foto-foto Dokumentasi Wawancara :



Wawancara dengan Kepala Subbagian Binamental dan Spiritual Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru Bapak Agus Hatorangan, S.Ag., MIP.



Wawancara dengan Kepala Pengurus Masjid Paripurna Al-Huda Bapak Nursal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Masjid Paripurna Al-Huda.



Wawancara dengan Kepala Pengurus Masjid Paripurna Al-Mukminin Bapak Yendri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masjid Paripurna Al-Mukminin



Wawancara dengan Kepala Pengurus Masjid Paripurna Darul Ihsan

Bapak Dr. Endrianto Efendi, S.H., M.H.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masjid Paripurna Darul Ihsan.



Wawancara dengan Kepala Pengurus Masjid Paripurna Az-Zikra Bapak Warman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masjid Paripurna Az-Zikra.



Wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Puskesmas Simpang Baru kakak Nana Mutia, S.Km.

Lampiran II

Transkrip Wawancara Kepala Subbagian Binamental dan Spiritual

Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Apakah Dasar dibentuknya Perwako Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna
2. Apakah Tujuan dari Perwako Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna?
3. Siapakah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tenaga kesehatan di Masjid Paripurna?
4. Bagaimana prosedur Masjid Paripurna dalam membentuk Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu?
5. Bagaimana Sumber dana dalam penyediaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Masjid Paripurna?
6. Apakah Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Perwako Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna?
7. Apa Harapan dari pemerintah dengan adanya Perwako Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna?

Transkrip Wawancara Kepala Pengurus Masjid Paripurna Di Kecamatan

Binawidiya :

1. Apakah Anda mengetahui Perwako nomor 89 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna?
2. Apakah Pemerintah telah melakukan sosialisasi mengenai Perwako Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna?
3. Apakah masjid paripurna ini terdapat pos pelayanan kesehatan?
4. Apakah terdapat tenaga kesehatan dalam menjalaan pos pelayanan kesehatan?
5. Apakah pengurus Masjid Paripurna telah melakukan kerjasama degan pihak puskesmas dalam penyediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan pos pelayanan kesehatan terpadu Masjid Paripurna?
6. Apakah ada anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program ini?
7. Apa hambatan dari pelaksanaan Perwako Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transkrip Wawancara Kepala Bidang Kesehatan dan Lingkungan Puskesmas Simpang Baru :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah Anda mengetahui Perwako nomor 89 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna?
2. Apakah peran puskesmas dalam menjalankan program pos pelayanan kesehatan terpadu masjid paripurna?
3. Apakah Pemerintah telah melakukan sosialisasi mengenai Perwako Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna?
4. Apakah masjid paripurna di kecamatan binawidiya sudah mengusulkan kebutuhan sumber daya pos pelayanan kesehatan terpadu?
5. Apa hambatan dari Puskesmas dalam memberikan kebutuhan sumber daya pos pelayanan kesehatan terpadu di Masjid Paripurna?
6. Apakah masa *covid-19* puskesmas mengadakan kerjasama bersama Masjid Paripurna untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di Masjid Paripurna?
7. Apakah puskesmas pernah mengadakan kerjasama bersama Masjid Paripurna untuk melaksanakan program pos pelayanan kesehatan terpadu Masjid Paripurna?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018”** yang ditulis oleh:

Nama : **Zedri Romanda**
NIM : 11727101919
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH.,MH

Sekretaris
Nurhidayat, SH.,MH

Penguji I
Muslim, S.Ag.,SH.,M.Hum

Penguji II
Joni Alizon, SH.,MH

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 Februari 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/2316/2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Kepada
Yth. Asril, SHI, MH
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : ZEDRI ROMANDA
NIM : 11727101919
Jurusan : Ilmu Hukum S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu Di Masjid Paripurna Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan



Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl
NIM 19660803 199303 1 004

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu Di Masjid Paripurna Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018, ditulis oleh saudara :

Nama : Zedri Romanda
NIM : 11727101919
Program Studi : ILMU HUKUM

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, / 19 Februari 2021
Narasumber : Nur Hidayat, S.H., M.H.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru,
Narasumber

Nur Hidayat. S.H., M.H.

NIP. 130217038

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang-Undang

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 Februari 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2317/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ZEDRI ROMANDA
NIM : 11727101919
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Mesjid Paripurna Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu Di
Masjid Paripurna Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89
Tahun 2018

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan:
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU KECAMATAN BINAWIDYA

Jalan H.R Subrantas No.52 Telp. (0761) 63317 Pekanbaru

SURAT KETERANGAN
Nomor : 400/KB-Kessos/07 /2021

Yang Bertandatangan dibawah ini :

a. Nama : YESE POITA INDRI PUTRI, SE
b. Jabatan : Kasi Kesejahteraan Sosial

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. NIM : 11727101919
b. Nama : ZEDRI ROMANDA
c. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
d. Jurusan : Ilmu Hukum
e. Judul Penelitian : Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 89 Tahun 2018

Maksud : Benar namanya tersebut diatas telah melakukan Riset/ Pra Riset dan Penelitian pada Kantor Camat Binawidya Kota Pekanbaru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 07 Juni 2021

Kasi Kessos



YESE POITA INDRI PUTRI, SE

NIP. 19800908 200501 2 009

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak cipta milik UIN Suska Riau
Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU KECAMATAN BINAWIDYA

ALAMAT : JALAN H.R SUBRANTAS NO.52 TELP. (0761) 63317
PEKANBARU

Pekanbaru, 1 Maret 2021

Nomor : 400/KBW-KESSOS/06/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset / Penelitian

Kepada
Yth. 1. Kecamatan Binawidya

Di -
Pekanbaru

Berkenaan dengan Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor: 071/BKBP-SKP/648/2021 tanggal 24 Februari 2021, maka bersama ini Kami minta Saudara kiranya dapat memfasilitasi dan membantu kelancaran penelitian:

N a m a : **ZEDRI ROMANDA**
NIM : 11727101919
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan : ILMU HUKUM
Jenjang : S1
Judul Penelitian : **"PELAKSANAAN PENYEDIAN TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN POS PELAYANAN TERPADU DI MASJID PARIPURNA KECAMATAN BINAWIDYA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NO.89 TAHUN 2018"**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih



EDI SUHERMAN, S.Sos., M.Si
Penit. Tk.I
NIP. 19751109 2007011 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/648/2021



a. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang

: Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/39018 tanggal 24 Februari 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **ZEDRI ROMANDA**
2. NIM : 11727101919
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : KAMPUNG MELAYU DESA TANJUNG BALAI KEC. KARIMUN KAB. KARIMUN-KEPULAUAN RIAU
7. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN POS PELAYANAN TERPADU DI MASJID PARIPURNA KECAMATAN BINAWIDYA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 89 TAHUN 2018**
8. Lokasi Penelitian :
 1. SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PEKANBARU
 2. DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU
 3. KANTOR KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU
 4. MASJID PARIPURNA KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 Februari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KESEHATAN

Jalan Melur Nomor 103 Telepon (0761) 23213
PEKANBARU

Pekanbaru, 29 April 2021

Kepada
Yth. Kepala Puskesmas
Simpang Baru
di-
Pekanbaru

Nomor : 071/Diskes-Umum/1272/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Riset

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kota Pekanbaru Nomor 071/BKBP-SKP/648/2021 tanggal 24 Februari 2021, tentang rekomendasi penelitian kepada :

Nama : Zedri Romanda
NIK : 11727101919
Instansi : UIN Suska Riau
Fakultas/Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan Binamadya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan kepada Saudara untuk dapat membantu kelancaran pengumpulan data dan penelitian kepada yang bersangkutan di atas.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pekanbaru
Plh. Sekretaris,

dr. Fira Septiyanti
Pembina
NIP. 197604172005012010

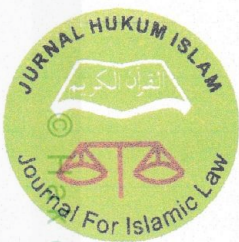
Tembusan :
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Siska Riau di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : ZEDRI ROMANDA
NIM : 11727101919
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PELAKSANAAN PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN POS PELAYANAN KESEHATAN TERPADU DI MASJID PARIPURNA KECAMATAN BINAWIDIYA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 89 TAHUN 2018

Pembimbing: Asril, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 13 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.